

## **BAB II**

### **MINYAK KELAPA SAWIT SEBAGAI KOMODITAS UTAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai alasan Indonesia memilih kelapa sawit sebagai komoditas utama dalam perekonomian Indonesia, kemudian memaparkan perkembangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional serta akan menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi akibat adanya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dianggap oleh Uni Eropa sebagai faktor utama terjadinya deforestasi terhadap hutan Indonesia.

#### **A. Alasan Pemilihan Kelapa Sawit Sebagai Komoditas Utama**

Kegiatan ekspor merupakan salah satu aktivitas perdagangan internasional yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara, yang dimana dapat menghasilkan devisa negara serta digunakan untuk membiaya kegiatan impor dan pembiayaan pembangunan sektor-sektor dalam negeri. Sebagai negara agraris, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor paling potensial dalam bidang pertanian Indonesia (Sastrosayono, 2003).

Beragamnya hasil dari perkebunan Indonesia seperti kopi, teh, tembakau, rempah-rempah, karet dan lain sebagainya menjadikan tarik tersendiri bagi bangsa Eropa di masa lampau. Hal ini membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai sektor yang mempunyai peran penting terkait perkembangan ekonomi di Indonesia. Mengingat kontribusinya yang sangat besar, maka hasil dari perkebunan pun menjadi andalan pendapatan nasional dan devisa negara (Ditjenbun, 2015).

Kelapa sawit menjadi salah satu sektor agroindustri yang paling potensial dan memiliki prospek yang baik ke depannya bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit dianggap sebagai penghasil minyak nabati paling efisien di dunia. Sebagai penghasil CPO (*Crude Palm Oil*), Indonesia merupakan penghasil CPO terbanyak di dunia dengan rata-rata kontribusinya sebesar 44,47% dari total produksi CPO di dunia. CPO memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan menjadi komoditas andalan sektor non-migas Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perdagangan Indonesia, kelapa sawit telah menyumbang 12,75% dalam kegiatan ekspor non-migas pada tahun 2017 (Ditjenbun, 2017).

**Grafik 1. Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) Indonesia**



(Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia, 2017)

Pada grafik diatas terlihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, Volume ekspor CPO Indonesia mengalami kenaikan yang awalnya hanya berada dibawah angka 20 juta ton per tahun meningkat menjadi 25 juta ton per tahun pada tahun 2015 (Ditjenbun, 2017). Meskipun telah terjadi sedikit penurunan sekitar 2 juta ton pada tahun 2016, akan tetapi hal tersebut tidak dapat membantah bahwa CPO Indonesia memang memiliki potensi yang tinggi di pasar dunia. Hal ini

juga didukung dengan adanya peningkatan produksi CPO Indonesia dari tahun ke tahun yang disajikan pada grafik dibawah ini.

**Grafik 2. Produksi CPO Indonesia**



(Sumber: BPS, 2017)

Produksi CPO Indonesia memiliki tren kenaikan yang cukup baik dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Tentunya hal ini akan mempengaruhi meningkatnya kegiatan ekspor CPO Indonesia, serta menjelaskan kembali bahwa terjadinya penurunan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2016 bukan diakibatkan oleh produksi CPO yang kurang, melainkan disebabkan oleh faktor lain yang memberikan dampak negatif terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Beberapa faktor dan variable yang mempengaruhi hal tersebut biasanya seperti harga di pasar domestik dan di pasar internasional yang berbeda, kemudian nilai tukar terhadap dollar US juga mempengaruhi turunnya volume ekspor CPO asal Indonesia (Ditjenbun, 2017).

Saat ini, Indonesia menjadi negara predikat produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia, dengan menguasai pangsa produk sekitar 63% sedangkan Malaysia yang merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit hanya menguasai

pangsa produksi sekitar 34%. Hal tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai sektor industri unggulan bagi Indonesia, terlihat juga dari luas perkebunan kelapa sawit dan tingkat produktivitasnya yang semakin tahun semakin meningkat.

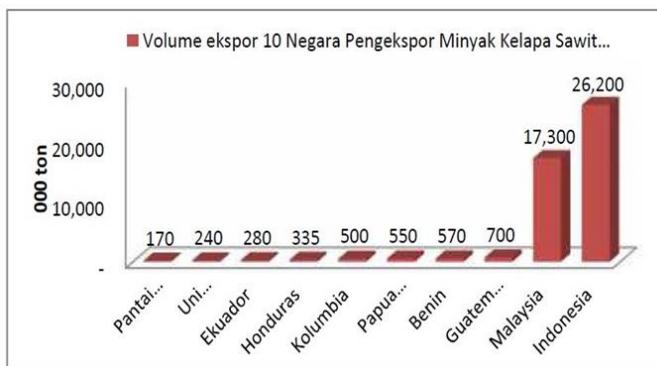
Dunia internasional memberikan predikat kepada Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia. Dengan menguasai pangsa produksi sekitar 63%, sedangkan Malaysia yang merupakan negara penghasil minyak sawit mentah hanya mampu menguasai pangsa produksi sekitar 34% saja. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai sektor industri unggulan bagi Indonesia.

Dengan adanya standar mutu yang tinggi dalam proses pengembangan minyak kelapa sawit, mengharuskan industri minyak kelapa sawit di Indonesia harus mengelola CPO sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang sustainable atau berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui sebuah kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang diresmikan Maret 2011, telah merampungkan suatu penyusunan standar dalam masalah kelestarian lingkungan selama masa pengembangan minyak kelapa sawit di Indonesia. Melalui kebijakan ini, menjadi salah satu langkah atau strategi Indonesia dalam meningkatkan daya saing global dari CPO Indonesia di pasar dunia.

Dianggap sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, produksi CPO Indonesia sering mendapatkan hambatan ekonomi maupun hambatan politik dari berbagai pihak. Contohnya yaitu dengan adanya hambatan dalam mengeksport CPO Indonesia ke Uni Eropa dikarenakan adanya rencana penerapan kebijakan RED II yang telah mengkategorikan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan serta pihak Uni Eropa sering melakukan *black campaign* terhadap sawit Indonesia, sehingga membuat citra kelapa sawit buruk di mata dunia (Hady, 2004).

Namun, sekalipun CPO Indonesia sering diterpa dengan isu black campaign yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa, jika dilihat dari keseluruhan volume ekspor CPO Indonesia ke seluruh dunia, Indonesia mampu bersaing penuh dengan negara lain dan berada di urutan pertama dalam kegiatan ekspor CPO di dunia. Hal ini ditunjukkan melalui grafik dibawah ini.

**Grafik 3. Volume Ekspor 10 Negara Pengekspor Kelapa Sawit**



(Sumber: United States Department of Agriculture, 2017)

Grafik diatas menunjukkan bahwa Indonesia telah berada diposisi teratas sebagai negara pengeksport CPO terbesar di dunia dengan jumlah total volume mencapai 26,5 juta ton pada tahun 2017. Pencapaian ini mengalahkan pencapaian dari saingan terberat nya yaitu negara Malaysia yang hanya mampu mengeksport CPO sebanyak 17,4 juta ton saja per tahun. Sehingga hal tersebut mengidentifikasi bahwa CPO Indonesia memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan minyak nabati di seluruh dunia (Ditjenbun, 2017).

## **B. Perkembangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Dunia**

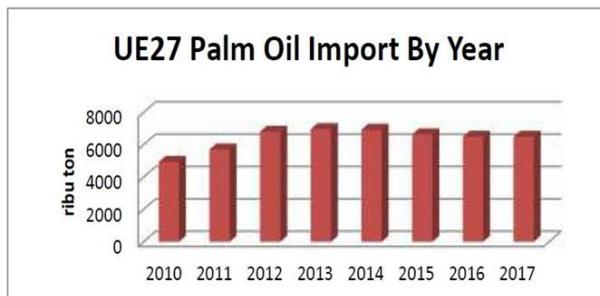
Dalam kurun waktu kurang lebih empat puluh tahun terakhir ini, industri kelapa sawit Indonesia telah berkembang secara signifikan. Adanya black campaign terhadap kelapa sawit terutama kelapa sawit dari Indonesia, menjadikan industri kelapa sawit Indonesia mendapat banyak tantangan dari pasar internasional. Namun, dengan hasil pencapaian produksi CPO pada tahun 2017 sebesar 42,05 juta ton, tetap menjadikan Indonesia terus bertahan sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, dan kegiatan ekspor CPO Indonesia telah menyumbang devisa negara yang mencapai angka USD 22,8 miliar (Maygirtasari & Mawardi, 2015).

Tujuan ekspor CPO atau minyak kelapa sawit mentah dari Indonesia tidak hanya berfokus pada kawasan Eropa ataupun kawasan Asia saja, akan tetapi telah berkembang sampai dengan ke kawasan Afrika dan Timur Tengah. Adapun beberapa negara tujuan dalam kegiatan ekspor CPO Indonesia pada tahun 2017 yaitu Afrika (2,28 juta ton), RRC (3,38 juta ton) dan Uni Eropa (5,02 juta ton) serta sejumlah negara tujuan lainnya.

Dari beberapa negara tujuan tersebut, Uni Eropa merupakan tujuan utama dan pasar paling potensial dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Faktor yang menjadikan Uni Eropa sebagai pasar yang paling potensial bagi Indonesia karena minyak sawit Indonesia memiliki harga yang terbilang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Eropa jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari ataupun *rapeseed oil*. Faktor lainnya juga terlihat dari meningkatnya permintaan industri perusahaan di Eropa yang memang sedang membutuhkan CPO untuk digunakan sebagai bahan baku industri dan biofuel (Maygirtasari & Mawardi, 2015). Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menjadi alasan

utama semakin tinggi dan meningkatnya volume ekspor CPO Indonesia ke kawasan Eropa yang dapat juga dilihat dari grafik berikut ini.

**Grafik 4. Kegiatan Impor Minyak Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa**



(Sumber: United States Department of Agriculture, 2017)

Grafik menunjukkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 terlihat adanya peningkatan dan perkembangan kegiatan impor minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kegiatan impor Uni Eropa mengalami peningkatan dengan volume ekspor tertinggi sebesar 6,9 juta ton. Sedangkan pada tahun 2013-2017 volume impor minyak kelapa sawit mengalami sedikit penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena adanya black campaign yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap tanaman kelapa sawit ataupun produk turunan dari kelapa sawit tersebut (Ditjetbun, 2008).

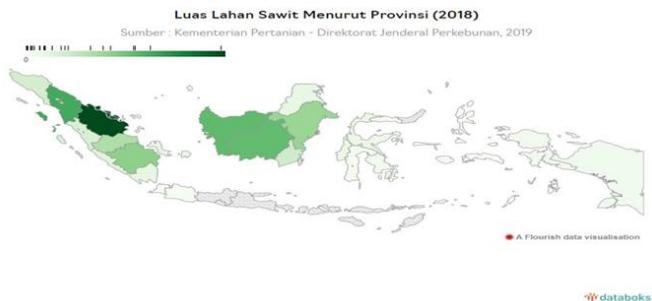
Selanjutnya Uni Eropa akan menerapkan suatu kebijakan RED II pada tahun 2024 yang sebelumnya tanaman kelapa sawit telah dikategorikan sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan untuk melindungi lingkungan akan tetapi terdapat indikasi lain bahwa Uni Eropa hanya ingin melindungi minyak nabati komoditas lokal seperti *rapeseed*



Luas perkebunan sawit Indonesia hingga Oktober 2019 mencapai 16,38 juta ha (angka sementara) yang tersebar luas dari Sumatra hingga Papua. Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dengan luas mencapai 3,37 juta ha atau hampir seperlima dari lahan perkebunan kelapa sawit di tanah air yang mencapai 16,37 juta ha. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun, 2013).

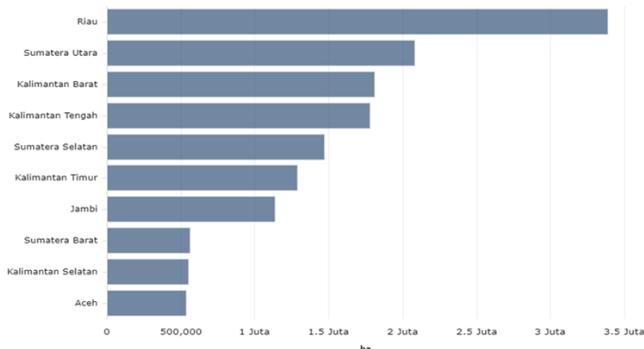
Kemudian sembilan provinsi lainnya dengan lahan sawit terluas seperti terlihat pada gambar, jumlahnya mencapai 14,59 juta ha atau sekitar 89% dari total. Selain itu dengan asumsi produktivitas selama 10 tahun terakhir sebesar 41,94 juta ton atau sekitar 94% total produksi minyak sawit nasional pada tahun 2019. Produksi minyak sawit dari perkebunan rakyat mencapai 16 juta ton, dari perkebunan besar negara 3,2 juta ton serta dari perkebunan swasta (nasional dan asing) sebesar 25,3 juta ton. Menurut status kepemilikannya, lahan sawit di tanah air terdiri atas 6,77 juta ha perkebunan rakyat dan untuk perkebunan besar negara seluas 1,05 juta ha serta 8,56 juta ha untuk perkebunan besar swasta (Ditjenbun, 2013).

**Gambar 2. Peta Luas Lahan Perkebunan Sawit Indonesia**



(Sumber: Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Pertanian, 2019)

**Grafik 5. Sepuluh Provinsi Dengan Lahan Sawit Terluas di Indonesia**



(Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019)

Untuk kabupaten dengan lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia dipegang oleh Kota Waringin Timur. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan sawit kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut seluas 425 ribu ha. Jumlah tersebut terdiri dari lahan perkebunan swasta nasional dan asing seluas 406 ribu ha serta perkebunan rakyat sebesar 19 ribu ha. Sementara itu, luas lahan yang terdapat di Kalimantan Tengah mencapai 1,48 juta ha. Angka tersebut terluas kedua di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Barat dengan luas mencapai 1,5 juta ha (Ditjenbun, 2015).

Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, perluasan perkebunan kelapa sawit terjerat dengan isu lingkungan yang ditimbulkan. Terutama dampak dari permasalahan perubahan fungsi lahan hutan dan lahan gambut yang banyak digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Disebutkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tersebut memberi dampak yang besar terhadap terjadinya deforestasi di hutan-hutan

Indonesia, yang kemudian mengancam hilangnya habitat satwa liar. Selain itu dengan adanya perluasan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber utama terjadinya kebakaran hutan secara dalam skala yang besar yang akhirnya nanti akan menghasilkan emisi gas karbon dan efek rumah kaca yang tinggi. Selain isu kerusakan lingkungan, dampak lain yang dirasakan dari pengembangan perluasan kelapa sawit yaitu munculnya isu sosial dan isu keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Dimana sering terjadinya konflik sosial antar masyarakat lokal yang memiliki perkebunan dengan perusahaan yang ingin merebut hak kepemilikan tanah dan penggunaan lahan demi kepentingan industri.

Banyak pandangan serta penelitian mengenai fakta dari dampak yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dipaparkan penjelasan terkait pandangan dua kelompok yaitu pihak yang menolak atau pihak konservasi yang menyalahkan industri kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan hutan di Indonesia, serta di pihak lain terdapat pihak yang mendukung atau pro terhadap pengembangan industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Terkait isu atau permasalahan dari perluasan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran telah mendapat perhatian dunia terutama dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) besar dunia. Seperti perhatian dari LSM WWF FCI (*Forest Conversion Initiative*) yang sudah dibentuk pada tahun 2011 merupakan kunci inisiatif dan pembentukannya ditujukan untuk fokus terhadap pengurangan perubahan hutan konservasi bernilai tinggi untuk dijadikan lahan perkebunan sawit (WWF, 2009). Kekhawatiran akan terjadinya kegiatan penebangan liar hutan secara liar yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati serta terjadinya konflik sosial antara masyarakat dan industri perkebunan kelapa sawit menjadi fokus perhatian para LSM saat ini. LSM tersebut mengkampanyakan *Borneo Orangutan Survival International*

sebagai titik fokus keprihatinan dalam menjaga keanekaragaman hayati (Colchester, et al., 2006).

Para LSM saat ini mengubah perhatian mereka dengan beralih memperhatikan terjadinya pemanasan global dan meningkatnya produksi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dari kegiatan perluasan dan produksi minyak sawit. Perhatian ini berubah setelah diterbitkannya EU Directive (*European Union Directive*) mengenai energi terbarukan yang berkenaan dengan kriteria energi berkelanjutan untuk bahan bakar nabati (Hooijer, Silvius, Wösten, & Page, 2006). Menurut Greenpeace, saat ini di Indonesia persediaan lahan gambut sedang dihabiskan dengan adanya pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit sehingga membuat Greenpeace memberi istilah “Industri minyak kelapa sawit memasak iklim” kepada perusahaan industri minyak kelapa sawit di Indonesia (Greenpeace, 2007). Akan tetapi, perusahaan dan industri kelapa sawit Indonesia menepis tuduhan dan julukan tersebut, menurut industri perkebunan minyak kelapa sawit serta organisasi-organisasi pro-pengembangan kelapa sawit menyatakan bahwa industri minyak kelapa sawit telah memenuhi syarat berkelanjutan dalam pengembangannya untuk jangka waktu yang lama.

Minyak kelapa sawit diyakini memiliki keunggulan yang kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti *sunflower oil* dan *rapeseed oil*. Dari semua minyak nabati lainnya, minyak kelapa sawit dianggap sebagai minyak yang paling produktif berkenaan dengan jumlah hasil ton per hektar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi dan mengembangkan minyak kelapa sawi hanya membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan lahan yang digunakan dalam memproduksi minyak nabati lainnya.

Dengan adanya industri perkebunan kelapa sawit sendiri memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit serta dapat dikatakan sebagai salah satu kunci dalam mengurangi angka kemiskinan melalui persediaan lapangan pekerjaan tersebut. Sehingga menurut para pendukung industri minyak kelapa sawit, dengan adanya dampak positif tersebut, industri perkebunan kelapa sawit harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan di Indonesia (Siegert, Rucker, Hinrichs, & Hoffmann, 2001).

Adanya dampak positif dari industri perkebunan kelapa sawit tersebut juga menjadikan *World Growth* mempromosikan industri kelapa sawit, mengingat bahwa industri kelapa sawit memiliki sisi positif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporan resminya mengatakan bahwa “Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang berkelanjutan”, sehingga pengkajian ulang akan dilakukan ulang oleh *World Growth* terhadap seluruh tuduhan mengenai keberlanjutan dan pengembangan ekonomi yang telah dituduhkan kepada industri minyak kelapa sawit Indonesia (World Growth, 2009).

Selama ini kampanye negatif terhadap kelapa sawit hanya untuk memperlihatkan sisi negatifnya saja tanpa melihat dampak baik terhadap adanya industri perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya kampanye negatif tersebut harus ditanggapi secara seksama (Wösten, et al., 2006). Dalam penjelasan selanjutnya akan diuraikan terkait beberapa fakta dan hasil dari beberapa pandangan kelompok pendukung minyak kelapa sawit dengan para kelompok anti kelapa sawit, antara lain:

### a. Penebangan Hutan Secara Liar

Program inti dari LSM seperti Greenpeace dan WWF yaitu untuk melindungi dan melestarikan hutan tropis yang tersisa dari penebangan liar. Tujuan dari program ini tentunya untuk menghentikan perubahan hutan yang akan digunakan sebagai lahan pertanian atau lahan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian WWF sendiri, beberapa wilayah di Indonesia masih sering terjadi penebangan hutan liar dalam skala yang besar, walaupun sebelumnya telah ada permintaan dan peringatan untuk moratorium atau penghentian secara global mengenai kegiatan pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Sekitar 20% emisi Gas Rumah Kaca global dihasilkan dari kegiatan deforestasi hutan Indonesia untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan klaim atau pernyataan tersebut disampaikan oleh Greenpeace sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Sehingga perkebunan kelapa sawit di Indonesia dianggap sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi terhadap hutan tropis Indonesia dan saat ini diperkirakan bahwa kawasan hutan di Indonesia hanya tersisa sedikit (World Growth, 2009).

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dari *World Growth*, mengatakan bahwa klaim dan pernyataan diatas dianggap terlalu berlebihan. Faktanya, sekitar 2/5 penebangan hutan yang terjadi dilakukan oleh penduduk yang berpendapatan rendah di beberapa negara-negara miskin. Penebangan tersebut dimaksudkan dalam rangka memperoleh suatu lahan perkebunan untuk memproduksi pangan penunjang kehidupan. Terlihat bahwa fakta sebenarnya menunjukkan bahwa penebangan tersebut terjadi atas dasar

motif kesejahteraan bukan dilakukan oleh industri kelapa sawit saja demi mendapatkan keuntungan yang besar (World Growth, 2009).

Data spesifik tentang perluasan kebun kelapa sawit dalam kegiatan penggundulan hutan memang terbatas dan beragam. Sehingga LSM anti-kelapa sawit mengasumsikan bahwa pertumbuhan areal kelapa sawit dilakukan dalam skala besar yang setiap tahunnya kegiatan penggundulan tersebut semakin meningkat.

Mengutip data yang didapatkan dari FAO, dari tahun 1999-2010 telah terjadi penyusutan hutan secara signifikan (World Growth, 2009). Di perkirakan sebanyak 5% dari 99,5 juta hektar hutan di Indonesia mengalami penyusutan. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut karena Indonesia sendiri telah meluncurkan suatu program dalam rangka mengurangi terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia melalui program moratorium yang akan berlangsung selama dua tahun. Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2010 lalu telah menandatangani sebuah surat kesepakatan yaitu Lol (*Letter of Intent*) dengan Pemerintah Norwegia. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memberlakukan penanggulangan pembukaan lahan selama 2 tahun untuk mengurangi emisi karbon.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan FAO menunjukkan bahwa sekitar 20%-35% telah terjadi kegiatan pembukaan lahan hutan di Indonesia untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit (Stern, 2006). Penelitian tersebut juga menunjukkan sepanjang tahun 2000-2005 adanya penurunan lahan hutan sekitar 13,2 juta hektar. Akan tetapi sebenarnya menurut pemerintah Indonesia bahwa jumlah tersebut merupakan

penggunaan lahan untuk infrastruktur bukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Indonesia juga masih memiliki 60% lahan hutan, dan Indonesia masih menyadari akan adanya kebutuhan dalam mempertahankan kawasan hutan sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

**b. Hilangnya Keanekaragaman Hayati**

Klaim dari kelompok anti-kelapa sawit yaitu LSM *Friend of Earth* mengemukakan bahwa ada kelompok hewan tertentu seperti gajah, harimau dan Orangutan saat ini terancam punah karena adanya kegiatan perluasan perkebunan lahan kelapa sawit, karena memang negara-negara penghasil minyak kelapa sawit merupakan negara dengan pusat keanekaragaman hayati dan nabati yang sangat luas (WWF, 2010).

Saat ini Orangutan menjadi titik fokus dari berbagai kampanye untuk melawan kelapa sawit di berbagai media masa. Ancaman terbesar terhadap masa depan Orangutan yaitu adanya dugaan pembalakan hutan secara liar, terjadinya kebakaran hutan dan lebih-lebih adanya perubahan lahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang tentunya akan merusak habitat dari Orangutan tersebut.

Kelompok hewan lain yang akan terkena dampak dari perluasan lahan kelapa sawit yaitu harimau dan gajah. Masalah ini akan dikaitkan juga dengan adanya konflik antar hewan liar dengan manusia yang dimana hewan tersebut akan turun ke permukiman warga akibat habitat asli mereka telah dirusak untuk digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.

Justru fakta lain menunjukkan bahwa adanya penyusutan habitat Orangutan, harimau dan gajah tidaklah semata-mata akibat dari konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Ada

faktor lain menurut para pendukung industri kelapa sawit yang mempengaruhi terjadinya kerusakan habitat hewan-hewan tersebut. Faktor tersebut diantaranya yaitu perburuan liar ataupun adanya kegiatan pertambangan yang menggunakan lahan hutan (WWF, 2010).

Dengan adanya fakta tersebut, klaim kelompok yang menyatakan bahwa pengembangan kelapa sawit sebagai faktor utama hilangnya habitat hewan seperti harimau, Orangutan dan gajah dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan fakta. Menghentikan pengembangan kelapa sawit tidak akan menjadi cara yang jitu untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut khususnya Orangutan.

Di Indonesia pun habitat Orangutan telah dilestarikan melalui suaka marga satwa yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang yang ada. Lembaga Pemerintahan, Organisasi Konservasi dan Industri kelapa sawit di Indonesia mendukung program perlindungan Orangutan tersebut. Lebih dari 24% hutan di Indonesia dicadangkan sebagai tempat untuk pelestarian hutan, dimana salah satunya dijadikan sebagai habitat Orangutan, termasuk 42% hutan di Aceh dan 40 b% hutan di Kalimantan (WWF, 2010).

### **c. Perubahan Iklim**

LSM anti-kelapa sawit mengklaim bahwa lahan tanah yang memiliki kandungan mineral mulai menipis dikarenakan adanya penggunaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, yang nantinya akan mendorong industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralih menggunakan lahan gambut. Dengan adanya perubahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan terjadinya pengeringan dari persediaan karbon

yang sangat banyak, mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan dan deforestasi serta mengakibatkan masalah terhadap mutu udara di dunia khususnya di Indonesia (Ali, Taylor, & Inubushi, 2006).

Beberapa LSM seperti Nature Alert pun mengklaim bahwa industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang paling berbahaya dan dapat merusak lingkungan serta mutu udara di dunia, serta *Greenpeace* memperkirakan sekitar 21% efek gas rumah kaca diakibatkan oleh deforestasi hutan di Indonesia (Djamhur, 2015).

Namun menurut kelompok pendukung kelapa sawit, mengklaim bahwa pernyataan yang disampaikan oleh LSM yang anti-kelapa sawit dirasa dogmatis dan terlalu berlebihan, dikarenakan belum ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung pernyataan LSM anti-kelapa sawit tersebut. Bahkan sebaliknya, terdapat bukti empiris yang berbeda. Dimana menurut pendukung kelapa sawit bahwa biofuel dari minyak kelapa sawit telah terbukti secara nyata dan lebih efisien dalam mereduksi Gas Rumah Kaca jika dibandingkan dengan biofuel lainnya (Hadi, Inubushi, Furukawa, Purnomo, Rasmadi, & Tsuruta, 2005).

Pengetahuan akan dampak nyata yang dihasilkan dari penanaman kelapa sawit di lahan gambut sampai saat ini pun masih diperdebatkan dikarenakan terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut paling banyak hanya menghasilkan 1/8 dari total produksi saja. Sehingga menurut pro-kelapa sawit sampai saat ini pun, industri kelapa sawit masih senantiasa terus melakukan inovasi terhadap pengembangan teknik penanaman kelapa sawit agar meminimalisir terjadinya produksi emisi

karbon yang tinggi jika tanaman kelapa sawit ditanam dan dikembangkan di lahan gambut (Jauhiainen, Heikkinen, Martikainen, & Vasander, 2001).

#### **d. Konflik Tanah**

Adanya konflik tanah yang terjadi akibat pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi klaim selanjutnya yang ingin disampaikan oleh LSM anti-kelapa sawit. Konflik tanah ini sering terjadi antara industri perusahaan kelapa sawit atau pihak pemerintah dengan para petani kecil serta masyarakat yang ada di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Di Indonesia, *Sawit Watch* mendokumentasikan sebanyak 500 kasus terkait permasalahan konflik tanah tersebut. Sedangkan WALHI mencatat ada sekitar 200 kasus yang terjadi di Kalimantan terkait adanya konflik tanah. Diklaim bahwa adanya paksaan untuk menyerahkan tanah para penduduk asli di sekitaran perkebunan ke pihak pemilik industri perkebunan agar memberi jalan dalam proses pengembangan dan perluasan lahan perkebunan sawit. Adanya pengembangan dan perluasan perkebunan sawit yang signifikan setiap tahunnya membuat penduduk lokal terpinggirkan dan membuat mereka jatuh miskin (CNN Indonesia, 2017).

Menurut LSM anti-kelapa sawit, hal tersebut biasanya terjadi di beberapa negara berkembang yang memproduksi minyak kelapa sawit, karena memang di negara-negara tersebut hak milik akan suatu lahan masih belum pasti dan belum tegas pendefinisian nya.

Namun fakta lain mengatakan sebaliknya. Klaim tersebut langsung ditolak oleh para pendukung kelapa sawit karena tidak representatif

dan dirasa tidak akurat. Dikatakan bahwa kemiskinan jarang terjadi dalam kasus pengembangan perkebunan sawit. Alasan yang dirasa paling mendasar adalah karena kelapa sawit selama ini dianggap sebagai tanaman paling produktif, menjadi devisa negara tertinggi dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi bangsa, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang luas yang nantinya akan menjamin kehidupan para petani kecil dan pekerja kebun yang ada di sekitar perkebunan jikalau nantinya mereka ingin melakukan kerjasama dengan industri minyak kelapa sawit (CNN Indonesia, 2017). Saat ini pemerintah Indonesia bersama KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia) sedang berupaya dalam mendukung dan membantu petani kecil untuk mengembangkan kebun kelapa sawit milik pribadi (Dradjat, 2017).

Dengan adanya berbagai macam polemik dan permasalahan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit, menjadikan Uni Eropa berhati-hati dan lebih menyaring bahan baku biofuel yang akan digunakan nantinya. Uni Eropa berkomitmen untuk menggunakan bahan baku biofuel yang ramah lingkungan serta tidak mengakibatkan deforestasi tinggi.

Menurut penjelasan *European Federation for Transport and Environment* (T&E), lembaga studi kebijakan dan kampanye lingkungan di Eropa menyatakan ada 5 pandangan utama yang mendorong Uni Eropa untuk dipertimbangkan kembali biodiesel dari minyak kelapa sawit yaitu emisi karbon biodiesel sawit tiga kali lebih besar dari energi fosil, Uni Eropa pernah keliru terkait biodiesel sawit karena industri minyak kelapa sawit banyak mengakibatkan masalah lingkungan, kemudian sertifikasi perkebunan kelapa sawit di

negara-negara penghasil minyak sawit tidak menjamin keberlanjutan, selain masalah lingkungan industri sawit banyak dikelilingi masalah sosial dan yang terakhir, bagi Uni Eropa Industri kelapa sawit saat ini adalah penyebab deforestasi terbesar di dunia.

Hal ini bertentangan dengan kriteria dalam kebijakan RED. Bahkan sampai saat ini sebagai wujud komitmen Uni Eropa terhadap kelestarian lingkungan, Uni Eropa berencana meluncurkan kebijakan energi baru yang disebut dengan *Renewable Energy Directive II* atau RED II. Demi mencapai target tersebut, RED II mengategorikan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian nantinya RED II akan menetapkan pengurangan konsumsi biodiesel sawit di negara-negara eropa, kemudian menghentikannya secara total (*phase-out*) mulai tahun 2030 nanti dari pasar Uni Eropa.